

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KECAMATAN HARAPAN DI
KECAMATAN GAYAMSARI KOTA SEMARANG**

Kinanti Dela Putri Bestari¹, R. Slamet Santoso², Ari Subowo³

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang

Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan yang terjadi di setiap Negara terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai kebijakan telah diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, salah satunya melalui pemberdayaan keluarga miskin, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) ialah pengembangan dari sistem perlindungan sosial yang bertujuan meringankan dan membantu keluarga miskin dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan teori Model Implementasi Kebijakan dari Merilee S Grindle yang terdiri dua dimensi besar yaitu Isi Kebijakan dan Lingkungan Implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program keluarga harapan sudah berjalan dengan baik namun masih ditemukan beberapa kendala terutama dari aspek, derajat perubahan yang diinginkan terkait perargetan dalam suatu periode tahun tentang jumlah KPM yang harus keluar dari masa transisi menuju ke graduasi sedangkan sumber daya dilibatkan terkait ketersediaan sumber daya manusia di lapangan dan fasilitas penunjang masih ditemukan kurangnya fasilitas untuk pendampingan di lapangan. Hal ini dipengaruhi juga oleh faktor penghambat seperti kesadaran dari masyarakat sendiri masih kurang, terdapat kekurangan sumber daya manusia dalam menangani keluarga penerima manfaat, Pendamping program keluarga harapan mengalami kesulitan karena beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah keluarga penerima manfaat yang terdapat di Kecamatan Gayamsari.

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan, Penanggulangan Kemiskinan

ABSTRACT

Poverty is a problem that occurs in every country, especially in developing countries like Indonesia. The government has taken various policies to solve the problem of poverty, one of which is through empowering poor families, namely the Family Hope Program (PKH). The Family Hope Program (PKH) is the development of a social protection system which aims to alleviate and help poor families with the hope that this program can reduce poverty. The method used is a qualitative-descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The theory used in this research uses Merilee S Grindle's Policy Implementation Model theory which consists of two large dimensions, namely Policy Content and Implementation Environment. The results of the research show that the implementation of the family hope program has gone well but there are still several obstacles found, especially in terms of the degree of change desired regarding targeting within a year period regarding the number of KPM who must leave the transition period to graduate while resources are involved related to the availability of resources. human resources in the field and supporting facilities are still found to lack facilities for assistance in the field. This is also influenced by inhibiting factors such as lack of awareness among the community itself, there is a lack of human resources in dealing with beneficiary families, Facilitators of the Family Hope Program experience difficulties because the workload is not commensurate with the number of beneficiary families in Gayamsari District.

Keywords: Implementation, Family Hope Program, Poverty Alleviation

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

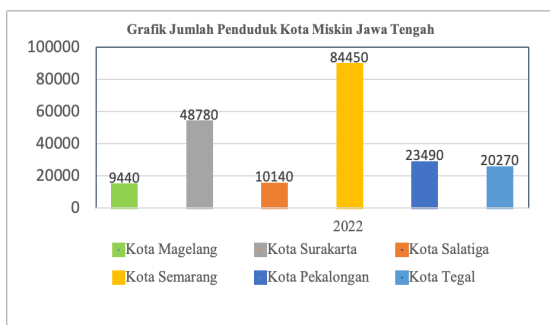
Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dalam proses pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Indonesia memiliki masalah kemiskinan yang masih menjadi sorotan utama terkait dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kemiskinan telah menjadi permasalahan pokok yang dirasakan oleh mayoritas negara termasuk Indonesia. Pada umumnya setiap negara akan berusaha untuk mengatasi kemiskinan. Akan tetapi kenyataannya mengatasi permasalahan kemiskinan bukanlah hal yang mudah. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022, dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah

garis kemiskinan sebesar 26,36 juta penduduk. Tingginya angka kemiskinan menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam melakukan pengentasan kemiskinan oleh pemerintah masih belum berhasil.

Salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan fakir miskin adalah Program keluarga harapan. Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan sebuah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang sudah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat dengan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan

pendapatan keluarga miskin dan rentan. Dengan mendorong perubahan perilaku dan menumbuhkan kemandirian, program ini memungkinkan Keluarga Penerima Manfaat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang penting, yang pada akhirnya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, program ini memperkenalkan produk dan layanan keuangan formal untuk memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat. Program Keluarga Harapan (PKH) sudah dilaksanakan sejak tahun 2007, namun di Kota Semarang baru dilaksanakan pada tahun 2013. Kota Semarang dipilih sebagai salah satu wilayah pelaksanaan program karena konsentrasi kemiskinannya yang tinggi, melebihi kota-kota lain di wilayah Jawa Tengah, seperti tergambar pada Grafik 1.1 dibawah ini :

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Kota Miskin Jawa Tengah

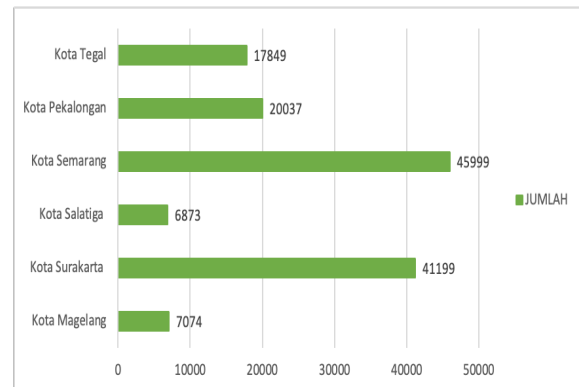


Sumber : BPS Jawa Tengah

Berdasarkan data BPS Jawa Tengah, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 Kota Semarang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 84.450 jiwa.

Pada tahun 2022, Kota Semarang menjadi kota dengan Keluarga Penerima Manfaat PKH terbanyak diantara keenam kota se-Jawa Tengah lainnya, yaitu sebesar 45.999 jiwa. Jumlah penerima KPM se-Kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada grafik 1.2 berikut :

Grafik 1.2 Jumlah KPM PKH Menurut Kota di Provinsi Jawa Tengah



Sumber : PKH Kementerian Sosial

Berdasarkan grafik 1.2, bahwa jumlah keluarga penerima manfaat PKH terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Semarang yang kemudian disusul oleh Kota Surakarta untuk posisi kedua dengan jumlah 41.199 KPM PKH.

Permasalahan yang kompleks membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana sebenarnya implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari, apakah dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum, serta faktor pendukung dan penghambat apa saja yang ada dalam implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
2. Menganalisis Faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (1998) (Rahman, 2017, p. 18), berpendapat bahwa Administrasi Publik merupakan sebuah upaya dalam mengkoordinasikan sumber daya dan para aparat publik dengan tujuan untuk menyusun, menjalankan, dan menetapkan sebuah pertimbangan dan mengelola

kebijakan publik. Administrasi public dapat didefinisikan sebagai sebuah cabang seni dan juga cabang ilmu (art and science) guna mengelola seluruh kebijakan publik dalam upaya untuk menguraikan setiap permasalahan yang terdapat di dalam masyarakat ataupun yang terdapat di dalam sebuah organisasi dan sejenisnya.

2. Kebijakan Publik

Menurut Chandler dan Plano dalam buku Kamus Administrasi Publik (1988: 107) public policy merupakan optimalisasi manfaat yang strategis terhadap berbagai sumberdaya yang tersedia untuk memecahkan kendala atau masalah yang terjadi di masyarakat maupun pemerintah. Dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa kebijakan publik adalah sebuah intervensi yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang tidak berdaya agar mereka dapat hidup dan terlibat dalam masyarakat. Jika dilihat dari definisi oleh Chandler dan Plano, kebijakan tidak semata dilihat untuk optimalisasi dari sumberdaya, tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat mendalam dan menentukan. (Yeremias T. Keban, 2014:60). Kebijakan publik mempunyai keterkaitan dengan administrasi publik karena berpengaruh dalam merumuskan kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan. Hal tersebut dikarenakan ilmu

administrasi memiliki ruang lingkup luas meliputi analisis dan perumusan kebijakan, aplikasi dan pengendalian pelaksana serta penilaian dan evaluasi hasil yang berasal dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, administrasi publik memiliki peran yang cukup besar karena terlibat tidak hanya dalam implementasi kebijakan, tetapi juga di proses perumusan serta evaluasi.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah langkah yang dilakukan dalam upaya mencapai suatu tujuan. Implementasi kebijakan adalah perwujudan dari keputusan kebijakan yang pada umumnya dalam bentuk undang - undang, perintah, maupun keputusan administrasi penting atau peradilan lainnya yang memiliki identifikasi masalah yang akan dibatasi. Pengertian implementasi menurut Grindle (1980) dalam Deddy Mulyadi (2015: 47) yaitu sebuah langkah yang dilakukan berupa tindakan administratif yang bisa diamati dalam tingkat tertentu. Grindle juga berpendapat bahwa implementasi kebijakan akan dilaksanakan jika sudah memiliki sasaran dan tujuan, program, serta dana untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jika dikaitkan dengan kebijakan publik, maka implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan dan disetujui menggunakan

sarana tertentu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Menurut Merilee S. Grindle (1980) terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan proses implementasi, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of implementation*). Grindle berpendapat bahwa setelah suatu kebijakan diresmikan oleh pemerintah, maka implementasi kebijakan dilakukan. Berikut merupakan indikator keberhasilan kebijakan:

2. Isi Kebijakan (*Content of Policy*) meliputi :
 - a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
 - b. jenis manfaat yang dihasilkan
 - c. derajat perubahan yang diinginkan
 - d. siapa pelaksana program, dan
 - e. sumberdaya yang dilibatkan
3. Lingkungan Kebijakan (*Context of Implementation*) meliputi :
 - a. kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
 - b. karakteristik lembaga dan daya tanggap, dan
 - c. kepatuhan dan daya tanggap.

Jika dikaji lebih lanjut, kebijakan dari Grindle ini menekankan pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang terkait dengan para pelaksana kebijakan, penerima implementasi, dan

kemungkinan konflik yang terjadi antara implementor, serta sumber daya implementasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini, digunakan model implementasi Merilee S. Grindle karena teori Grindle fokus pada konteks dan konten dari kebijakan publik khususnya yang berkaitan dengan implementator, penerima implementasi, dan konflik yang mungkin terjadi diantara pada aktor implementasi, serta sumber daya implementasi yang diperlukan.

4. Faktor yang Pendukung dan Penghambat Implementasi Program

Setelah melalui tahap perumusan, sebuah kebijakan kemudian diimplementasikan. Namun dalam proses implementasinya kerap dihadapkan dengan faktor penghambat dan pendukung implementasi sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini digunakan teori faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan menurut Andre A.H. (2022), yaitu:

1. Faktor Pendukung, yaitu koordinasi yang baik antar stakeholder dan sosialisasi kebijakan.
2. Faktor Penghambat, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Teknik pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi yang dilakukan peneliti untuk melakukan pengambilan data dilaksanakan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang. Dalam melakukan teknik pemilihan informan melalui purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kota Semarang
2. Koordinator Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang
3. Kepala Seksi Sosial Kecamatan Gayamsari
4. Pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari
5. Koordinator Pendamping Sosial Kecamatan gayamsari
6. 3 (tiga) Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari

PEMBAHASAN

A. Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

1. Isi Kebijakan

Content of polish atau isi kebijakan dari teori grindle menjelaskan bahwa implementasi kegiatan harus diikuti dengan kebijakan yang sudah diatur . sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 1 tahun 2018 mengenai program keluarga harapan.

a. Interest Affected (Kepentingan yang mempengaruhi)

Pada proses implementasi kebijakan, kepentingan-kepentingan akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan yang diinginkan. Pada indikator ini ditekankan bahwa dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan dan akan dilihat sejauh mana pengaruh kepentingan tersebut terhadap implementasi kebijakan. Linjamsos dinas sosial kota semarang berupaya menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan terhadap Keluarga Penerima Manfaat. Bentuk pemberdayaan yang dimaksud adalah melalui sosialisasi melalui P2K2 serta pemberian bantuan. Pihak Linjamsos dinas sosial Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran dalam menjalankan teknis kebijakan serta melakukan koordinasi terhadap seluruh pihak yang terlibat. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dilakukan oleh Pihak Kecamatan, sedangkan pihak pendamping, RT/RW berperan untuk memberikan sosialisasi dan juga pendampingan terkait Program Keluarga Harapan yang menjelaskan terkait tujuan dan keberhasilan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan program ini.

b. Type of Benefits (Tipe Manfaat)

Tipe manfaat dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan

termasuk ke dalam pengaruh positif. Dengan Program Keluarga Harapan, KPM memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial, menambah wawasan, dan mengembangkan kreativitas melalui sosialisasi P2K2 yang dilakukan oleh pendamping kepada KPM. KPM merasa terbantu dan mulai bangkit dari zona kemiskinan. Tentunya dengan adanya perubahan yang ditemukan ini menurunkan angka transisi yang ada di kecamatan gayamsari sehingga Program Keluarga harapan ini berjalan baik, walaupun masih ditemukan kendala pada kehadiran KPM yang tidak semuanya dapat hadir dalam sosialisasi yang diberikan karena mempunyai kesibukan masing – masing dan kendala lainnya.

c. Extent of Change Envision (Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai)

Mencapai tujuan dari perubahan implementasi kegiatan yang sedang dilaksanakan maka extent of Change and Vision merupakan batasan agar setiap kebijakan memiliki standar dan Skala yang lebih jelas untuk mencapai tujuannya. Pada implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari, KPM belum mengalami perubahan perilaku dan kemandirian. Hal ini dapat dilihat dari keluarga penerima manfaat yang sudah mampu namun tidak mau keluar serta tidak

bertanggungjawab pada kewajibannya sebagai penerima manfaat bantuan program keluarga harapan. Dengan demikian, tujuan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian di kecamatan gayamsari belum sepenuhnya berjalan baik.

d. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Letak pengambilan keputusan mengenai pendataan KPM PKH bahwa memang harus dilakukan validasi secara lanjut, agar KPM penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan kembali pengecekan ulang oleh para pelaksana kebijakan bantuan ini di setiap Kecamatan agar tepat sasaran melalui para pendamping yang bertanggung jawab atas tugas yang harus dilaksanakan serta masih kurangnya jumlah kuota bantuan PKH Di Kecamatan Gayamsari menyebabkan masih ada KPM yang masih sangat membutuhkan. Seharusnya untuk pemerintah adanya penambahan alokasi anggaran APBN untuk bantuan ini agar kuota jumlah bantuan bagi RTSM yang sesuai dengan persyaratan yang belum mendapatkan bantuan dapat di tambah lagi, sehingga tingkat kemiskinan dapat dikurangi secara perlahan. Pada letak pengambilan keputusan yang masih terdapat beberapa kendala seperti penetapan KPM yang masih belum tepat sasaran

dikarenakan ketidakcocokan data yang ada dengan yang terjadi dilapangan sehingga harus dilakukan pengecekan ulang oleh pendamping yang di beri arahan oleh Linjamsos yang membuat penambahan tugas yang harus dilakukan sehingga masih belum dikatakan berhasil.

e. Pelaksana program (Program Implementator)

Pelaksana program dalam implementasi kebijakan Program Keluarga harapan termasuk berjalan dengan baik. Tingkat pemahaman dan kompetensi dari seorang pelaksana kebijakan menjadi hal yang penting mengingat mereka yang akan melaksanakan kebijakan ini dilapangan, sehingga untuk terlibat dalam kebijakan ini dibutuhkan kompetensi khusus yang mampu memenuhi persyaratan sebagai pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran pendamping Program Keluarga Harapan dalam kegiatan sosialisasi yang tinggi, kemampuan pendamping Program Keluarga Harapan dalam menjelaskan program PKH kepada Keluarga Penerima Manfaat dan kemampuan pendamping Program Keluarga Harapan dalam membantu keluarga penerima harapan dalam mengakses program dan layanan PKH.

f. Resources Committed (Sumber Sumber Daya yang Digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sumberdaya yang digunakan dalam kebijakan ini antara lain; ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, fasilitas penunjang. Pada dukungan anggaran telah dijalankan dengan baik yang dibuktikan dengan penambahan anggaran akan selalu diikuti dengan penambahan kuota keluarga penerima manfaat PKH. Hal ini menunjukkan dukungan anggaran telah didukung sepenuhnya oleh pemerintah pusat dengan penambahan anggaran dan diikuti dengan penambahan kuota. Namun masih ditemukan beberapa kendala pada bagian sumber daya manusia dan fasilitas penunjang hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan kekurangan pendamping PKH dilapangan, hal tersebut akan menghambat pengimplemtasian program dikarenakan pendamping merupakan komponen penting yang dibutuhkan untuk sosialisasi dan pemecah masalah bagi masyarakat. Tugas yang memberatkan pendamping dapat membuat pelaksanaan menjadi terhambat dan pada fasilitas penunjang masih ditemukan kekurangan falisitas pada saat dilakukan pendampingan di lapangan seperti tempat yang disediakan untuk dilakukan P2K2, laptop, lcd, serta internet sebagai penunjang pelaksanaan sosialisasi.

2. Context Of Implementation

Context kebijakan (lingkungan kebijakan) merupakan hal yang menentukan bagi keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik termasuk kebijakan Program Keluarga Harapan.

a. Power, Interest, and Strategy of Actor Involved (Kekuasaan, Kepentingan-Keperentingan, dan Strategi dari Aktor yang Terlibat)

Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam implementasi program keluarga harapan dapat dilihat dari pelaksana kebijakan masing-masing sudah memiliki peran dalam proses implementasi kebijakan. Strategi utama yang dilakukan saat implementasi kebijakan adalah dengan melakukan sosialisasi bagi masyarakat melalui pertemuan P2K2 yang dilakukan oleh pendamping. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan kepentingan para pelaksana kebijakan yaitu mewujudkan implementasi kebijakan yang optimal agar permasalahan kemiskinan di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dapat teratasi.

b. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)

Karakteristik lembaga dan penguasa dalam proses implementasi kebijakan program keluarga harapan dapat dilihat dari adanya Proses prosedur pelayanan dan Proses

penanganan pengaduan agar kebijakan ini dapat mencapai tujuan dan dilaksanakan secara optimal. Namun masih ditemukan permasalahan dalam penyaluran dana bantuan yang disebabkan terjadinya masalah pada ATM keluarga penerima manfaat. Selain itu, permasalahan yang dialami KPM tidak dijelaskan secara transparan oleh pemerintah sehingga KPM hanya dapat menunggu hingga ATMnya dapat digunakan kembali. Disisi lain, proses penerimaan keluarga penerima manfaat PKH juga masih belum transparan, dimana penerimaan KPM cukup memakan waktu yang lama serta tidak adanya kriteria yang spesifik yang berakibat pada munculnya kecemburuan antara masyarakat. Disisi lain, respon pemerintah dalam penanganan pengaduan juga menjadi penilaian kepuasan keluarga penerima manfaat. Namun pada pelaksanaannya di Kecamatan Gayamsari, respon pemerintah atau pendamping dalam menanggapi permasalahan KPM PKH dinilai sangat lambat. Dengan demikian, kemudahan pengaduan yang tidak diimbangi dengan respon yang baik dalam menyelesaikan pengaduan dinilai belum bisa memuaskan keluarga penerima manfaat.

c. Compliance and Responsiveness (Tingkat Kepatuhan dan Adanya Respon dari Pelaksana)

Kepatuhan dan daya tanggap dalam implementasi proses implementasi kebijakan program keluarga harapan dapat dilihat dari Tingkat Kepatuhan Pelaksana Kebijakan dan Respon Pelaksana terhadap Kebijakan Program Keluarga Harapan. Saat ini menjalankan layanan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demi terbentuknya kerjasama yang baik, PPKH terus melakukan koordinasi dengan Linjamsos terkait PKH. Selain itu, dinas sosial juga bekerjasama dalam menyelesaikan permasalahan KPM yang tidak ingin dikeluarkan karena sudah tidak memenuhi kriteria PKH. Disisi lain Respon pelaksana belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih ditemukan Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Gayamsari yang mengalami permasalahan dalam penyaluran bantuan, permasalahan yang dialami Keluarga penerima manfaat tidak dijelaskan secara transparan oleh pemerintah, proses penerimaan keluarga penerima manfaat PKH juga masih belum transparan.

B. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

Menurut Andre A.H. (2022) sebuah kebijakan dalam implementasinya pasti memiliki faktor pendukung dan

penghambat. Berikut merupakan faktor pendukung yang terdiri dari koordinasi yang baik antarstakeholder, sosialisasi kebijakan, dan sumber daya finansial. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan.

1. Faktor Pendukung

a. Koordinasi dan sosialisasi

Koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping di respon baik oleh pihak – pihak pelaksana serta sasaran kebijakan yaitu Keluarga Penerima Manfaat. Hal ini dikarenakan koordinasi yang dilakukan antar pihak–pihak pelaksana terjalin baik dan saling membantu untuk menyukseskan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari. Sosialisasi yang dilakukan pendamping melalui P2K2 juga disambut baik oleh Keluarga Penerima Manfaat karena adanya sosialisasi yang dilakukan membantu KPM untuk dalam mengembangkan kreativitas serta mengatasi permasalahan yang terjadi.

b. Pengelolaan Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial menjadi salah satu faktor pendukung implementasi. Program keluarga harapan mendapatkan dana anggaran yang cukup menciptakan kuota yang banyak pada KPM. Penambahan kuota penetapan keluarga penerima manfaat dipengaruhi oleh peningkatan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, daya serap anggaran juga telah terlaksana dengan baik, dimana setiap adanya penambahan anggaran akan selalu dilakukan validasi untuk menetapkan calon keluarga penerima manfaat yang baru.

2. Faktor Penghambat

a. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran dari masyarakat sendiri masih kurang, sehingga kebijakan dari Program Keluarga Harapan ini masih belum terlaksana dengan baik. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan dan mematuhi kebijakan masih kurang karena mereka menganggap kebijakan ini cenderung untuk memnghidupi masyarakat dan menjadikan masyarakat bergantung

pada program.. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti melakukan sosialisasi dan penegasan dalam pemahaman terkait program.

b. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan suatu program. Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai akan mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan dari kebijakan. dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari masih kekurangan sumber daya manusia dalam menangani KPM. Pendamping Program Keluarga Harapan mengalami kesulitan karena beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah KPM PKH, dimana jumlah KPM yang harus didampingi setiap pendamping PKH di Kecamatan Gayamsari telah melebihi standar rata – rata jumlah KPM. Perbedaan jumlah ini menimbulkan beban kerja yang

dialami pendamping keluarga penerima manfaat di Kecamatan Gayamsari.

PENUTUP SIMPULAN

1. Content of Policy

a. Pada Implementasi kebijakan program keluarga harapan ditemukan beberapa indikator sudah berjalan dengan baik yaitu meliputi : pertama, kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang mempengaruhi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh pihak-pihak yang terlibat sudah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga berpotensi terjadinya keberhasilan Kedua, tipe manfaat dalam implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan masyarakat yang sudah menjadi KPM, sudah mendapatkan bantuan yang akan dibantu oleh pendamping dengan diberikan arahan terkait penyaluran bantuan serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh KPM. Namun terkait peningkatan

pendapatan pada KPM masih belum terlaksana dengan baik serta Ketiga, pelaksana program dalam implementasi kebijakan Program Keluarga harapan termasuk berjalan dengan baik. Tingkat pemahaman dan kompetensi dari seorang pelaksana kebijakan menjadi hal yang penting dalam pelaksana kebijakan Program Keluarga Harapan.

- b. Pada indikator *Content of Policy* masih ditemukan juga beberapa kendala yang meliputi : Pertama, derajat perubahan yang diinginkan bahwa belum dapat dikatakan berhasil, Hal ini dikarenakan masih ditemukannya KPM yang terlalu bergantung pada bantuan ini dan tidak memiliki usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selalin itu program ini belum bisa meningkatkan pendapatan sehingga belum bisa meningkatkan taraf hidup KPM. Kedua, letak pengambilan keputusan yang masih terdapat beberapa kendala seperti penetapan KPM yang masih belum tepat sasaran dikarenakan ketidakcocokan data yang ada dengan

yang terjadi dilapangan. Ketiga, sumber daya dilibatkan dalam implementasi Program masih kurang pada bagian ketersediaan SDM dan fasilitas penunjang. Selain itu, fasilitas penunjang masih ditemukan kekurangan falisitas pada saat dilakukan pendampingan di lapangan seperti tempat yang disediakan untuk dilakukan P2K2, laptop, lcd, serta internet sebagai penunjang pelaksanaan sosialisasi.

2. Context of Policy

- a. Pada Implementasi kebijakan program keluarga harapan ditemukan beberapa indicator sudah berjalan dengan baik yaitu meliputi : Pertama, Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat dalam implementasi Program tidak ada kekuasaan dan kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi para pelaksana kebijakan memang sesuai dengan amanat yang telah direncanakan tanpa adanya intervensi dari pihak lain yang memiliki kekuasaan dan kepentingan tertentu. Kedua, Tingkat

kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana dapat diketahui bahwa para pelaksana kebijakan sudah merespon dengan baik dalam implementasinya dan mengikuti sesuai dengan adanya peraturan yang ada.

- b. Pada indikator *Context of Policy* masih ditemukan juga beberapa kendala yaitu :
Karakteristik Lembaga dan Daya Tanggap lamanya proses penetapan calon PKH serta tidak transparannya hasil penetapan membuat masyarakat tidak puas, kemudahan pengaduan yang tidak diimbangi dengan respon yang baik dalam menyelesaikan pengaduan dinilai belum bisa memuaskan keluarga penerima manfaat.
3. Faktor pendukung dan penghambat secara keseluruhan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan implementasi program keluarga harapan. Adapun rinciannya sebagai berikut :
 - a. Factor pendukung dalam implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari yaitu: Pertama,

koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping di respon baik oleh pihak pelaksana serta sasaran kebijakan yaitu KPM. Hal ini dikarenakan koordinasi yang dilakukan antar pihak – pihak pelaksana terjalin baik dan saling membantu untuk menyukseskan implementasi kebijakan. Kedua, pengelolaan sumber daya finansial dimana pengelolaan anggaran telah dijalankan serta diserap dengan baik yang dibuktikan dengan adanya penambahan anggaran akan selalu diikuti dengan penambahan kuota Keluarga Penerima Manfaat PKH.

- b. Faktor penghambat dalam implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Gayamsari yaitu: Pertama, kesadaran dari masyarakat sendiri masih kurang, sehingga kebijakan dari Program masih belum terlaksana dengan baik. Kesadaran masyarakat yang masih kurang membuat pengimplementasian kebijakan Program Keluarga Harapan ini terhambat dan dibutuhkannya

pemahaman terkait program. Kedua, masih kekurangan SDM dalam menangani KPM. Pendamping mengalami kesulitan karena beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah KPM PKH, dimana jumlah KPM yang harus didampingi setiap pendamping telah melebihi standar rata – rata jumlah KPM. Perbedaan jumlah ini menimbulkan beban kerja yang dialami pendamping keluarga penerima manfaat di Kecamatan Gayamsari.

SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Guna meningkatkan keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan Perbaikan yang perlu dilakukan terkait derajat perubahan yang diinginkan sebaiknya dengan : a. Meningkatkan ketegasan pendamping PKH dalam melakukan pengawasan kepada KPM dalam menjalankan kewajibannya, b. Meningkatkan kemampuan KPM untuk lebih produktif.
- c. Meningkatkan kualitas pendamping PKH dengan memberikan pelatihan dan pembekalan kepada pendamping PKH untuk meningkatkan kualitas layanannya.
2. Guna meningkatkan keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan Perbaikan yang perlu dilakukan terkait letak pengambilan keputusan sebaiknya dengan : a. memperbaharui data lama dengan data yang lebih terbaru agar tepat sasaran. b. pengecekan ulang pada data yang diberikan pusat. c. meningkatkan jumlah KPM di BDST, serta meminimalisir kuota PKH diluar RTSM
3. Guna memastikan keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan terkait sumber daya yang dilibatkan perlu adanya peningkatan dalam : a. menambah jumlah pendamping PKH, b. memenuhi fasilitas penunjang, seperti tempat untuk P2K2, laptop, LCD, dan

internet serta meningkatkan koordinasi antar stakeholder.

4. Guna memastikan keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan terkait Karakteristik Lembaga dan Daya Tanggap perlu adanya peningkatan dalam transparansi penetapan KPM, serta meningkatkan ketanggapan pemerintah dalam membantu permasalahan yang dihadapi KPM.
5. Perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap PKH: a. meningkatkan sosialisasi tentang PKH, b. melakukan edukasi tentang PKH kepada masyarakat dan membangun stigma positif terhadap KPM PKH.
6. Perbaikan yang perlu dilakukan terkait sumber daya manusia dalam meningkatkan potensi sumber daya pada implementasi Program Keluarga Harapan: a. menambah jumlah pendamping PKH, b. memberikan pelatihan kepada pendamping PKH

dan c. meningkatkan kesejahteraan pendamping PKH.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, A. (2022). Implementasi Peraturan Bkpm Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengendalian Dan Pelaksanaan
- Daely, B., & Atika, T. (2024). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Dusun Pasar Tambunan Desa Lumban Pea Kecamatan Balige Kabupaten Toba. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 362–372. <https://doi.org/10.54066/Jupendis.V2i2.1723>
- Elwan, L. O. M. (2018). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. *Journal Publihuo*, 1–17.
- Mat Saleh. (2013). *Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Kube (Kelompokusahabersama) Di Kecamatan Sukamarakabupaten Sukamara (Studi Pada Dinas Sosnakertrans Kabupaten Sukamara)*.
- Weni, S. (N.D.). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak. *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik*.